

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN
DI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Cecep Noviansah
Nomor Mahasiswa : 19313240
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN
DI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Cecep Noviansah

Nomor Mahasiswa : 19313240

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiarisme seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2025

Penulis,



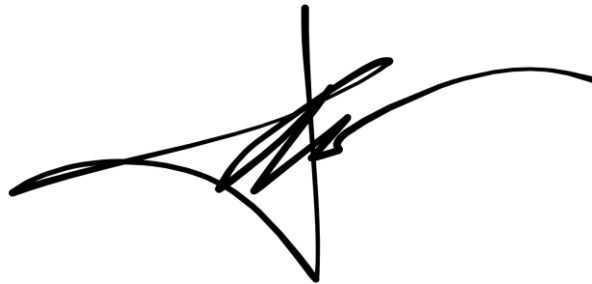
Cecep Novianah

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2018-
2023

Nama : Cecep Noviansah
Nomor Mahasiswa : 19313240
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Juni 2025
Telah disetujui dan disahkan
oleh Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.

Drs. Awan Setya Dewanta M.Ec.Dev.

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN
2018-2023**

Disusun oleh : CECEP NOVIANSAH

Nomor Mahasiswa : 19313240

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 16 Juli 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Penguji : Lak lak Nazhat El Hasanah, SE.,M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

Imam Syafii

“Hidup (di dunia) hanya sekali, maka hiduplah yang berarti”

KH. Imam Zarkasyi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Segala upaya dan perjalanan dalam menyusun penelitian ini tidak lepas dari pertolongan-Nya. Sholawat serta salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia, yang ajaran-ajarannya senantiasa menjadi pedoman hidup. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya. Aamiin

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan doa sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti baik secara moril maupun materil. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.
2. Saudara-saudaraku tersayang, yang selalu memberikan semangat, doa, dan tawa yang menguatkan di setiap langkah. Terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang telah kalian berikan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh berkah. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaatnya kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada Program Studi Ilmu Ekonomi. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev., selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dan dedikasi memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
4. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti, baik secara moril maupun materil.
5. Saudara-saudara penulis, yang selalu memberikan semangat, tawa, dan doa di setiap langkah penulis.
6. Rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman terdekat, yang telah menemani dalam proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam berbagai bentuk hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, besar harapan penulis agar karya ini dapat menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
2.1 Kajian Pustaka	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Kemiskinan.....	15
2.2.2 Pendidikan	18
2.2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan	18
2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	20
2.2.5 Usaha Mikro dan Kecil.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
2.4 Hubungan antar Variabel Independen dan Dependen.....	22
2.4.1 Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan	22
2.4.2 Hubungan PDRB atas Harga Konstan Terhadap Kemiskinan	23
2.4.3 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan	23
2.4.4 Hubungan Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Kemiskinan	24

2.5	Hipotesis Penelitian	24
BAB III.....		26
3.1	Penelitian dan Sumber Data	26
3.2	Definisi Operasional Variabel	26
3.2.1	Variabel Independen.....	27
3.2.2	Variabel Dependen.....	27
3.3	Metode Analisis	28
3.3.1	Estimasi Regresi Data Panel	28
3.4	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	31
3.4.1	Uji Chow.....	31
3.4.2	Uji Lagrange Multiplier (LM).....	31
3.4.3	Uji Hausman	32
3.5	Uji Signifikansi.....	32
3.5.1	Uji Simultan F	32
3.5.2	Uji Parsial t	33
3.5.3	Koefisien Determinasi (R-Squared).....	33
BAB IV		34
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	34
4.2	Statistika Deskriptif.....	34
4.3	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	36
4.3.1	Pemilihan Model Regresi.....	36
4.3.2	Estimasi Model Fixed Effect	37
4.3.3	Koefisien Determinasi (R ²)	38
4.3.4	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	39
4.3.5	Uji Parameter Individual (Uji t).....	39
4.4	Pembahasan.....	40
4.4.1	Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan.....	40
4.4.2	Pengaruh PDRB atas harga konstan terhadap Tingkat Kemiskinan	41
4.4.3	Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan	42
4.4.4	Pengaruh pekerja UMK terhadap Tingkat Kemiskinan	43
BAB V.....		45
5.1	Kesimpulan.....	45

5.2 Implikasi.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kemiskinan di Pulau Jawa 2018 – 2023 (persen)	2
Tabel 1. 2 Data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2018 – 2023 (persen).....	3
Tabel 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 (tahun)	4
Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 (persen)	6
Tabel 1. 5 Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 (persen)	8
Tabel 4. 1 Hasil Statistika Deskriptif.....	34
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow.....	36
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman	37
Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Model Fixed Effect.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Data Penelitian	50
lampiran 2 Common Effect Model.....	54
lampiran 3 Fixed Effect Model.....	55
lampiran 4 Random Effect Model	56
lampiran 5 Uji Chow	57
lampiran 6 Uji Hasuman.....	58
lampiran 7 Uji Lagrange Multiplier	59
lampiran 8 Statistika Deskriptif	59

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan, PDRB atas harga konstan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel dengan bantuan software Eviews 12 dan model regresi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Kata kunci: Kemiskinan, PDRB atas harga konstan, TPT, UMK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan yang besar merupakan dua masalah utama yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya proporsi penduduk miskin di suatu daerah menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita sehingga berdampak pada berkurangnya daya beli. Keadaan ini menjadi lebih buruk jika tingkat pengangguran di daerah tersebut juga tinggi. Di era globalisasi ini, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi khususnya menjadi kunci menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Mudjarat Kuncoro (2000) berpendapat bahwa penyebab kemiskinan berasal dari teori Nurks yaitu teori lingkaran setan kemiskinan, yang diantaranya terdapat tiga penyebab utama, yaitu: (i) Adanya keterbelakangan dan keterbelakangan sumber daya manusia (SDM), yang mencerminkan Indeks pembangunan manusia lebih rendah. (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka (tercermin dari rendahnya PDB per kapita). Pendapatan yang rendah akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang rendah menyebabkan rendahnya akumulasi modal sehingga menyebabkan rendahnya proses penciptaan lapangan kerja (tercermin pada tingginya pengangguran). Akumulasi modal yang rendah disebabkan oleh alasan-alasan seperti keterbelakangan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin dari berhasil atau tidaknya pembangunan daerah tersebut. Apabila suatu daerah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya, maka daerah tersebut dapat dikatakan mempunyai posisi dalam pembangunan ekonomi. Namun, satu pertanyaan yang masih tersisa dalam pembangunan ekonomi yaitu apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah merata di seluruh lapisan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2020) pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan dapat menyebabkan kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal meskipun ekonomi secara keseluruhan berkembang.

Ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politis, kemiskinan dapat dilihat dari segi akses terhadap kekuasaan, artinya intuisi politik dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam mengakses dan menggunakan sumber daya. Dari sudut pandang psikologi sosial, kemiskinan dapat dilihat dari kurangnya jaringan dan struktur sosial yang mendukung peluang peningkatan produktivitas.

Tabel 1. 1 Kemiskinan di Pulau Jawa 2018 – 2023 (persen)

Pulau Jawa	Persentase Kemiskinan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D.I. Yogyakarta	11,81	11,44	12,80	11,91	11,49	11,04
Jawa Tengah	11,19	10,58	11,84	11,25	10,98	10,77
Jawa Timur	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35
Jawa Barat	7,25	6,82	8,43	7,97	7,98	7,62
Banten	5,25	4,94	6,63	6,50	6,24	6,17
DKI Jakarta	3,55	4,53	4,69	4,67	4,61	4,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka kemiskinan di pulau Jawa sendiri tergolong tinggi, pada tahun 2022 proporsi penduduk miskin di pulau Jawa ditempati oleh Provinsi D.I. Yogyakarta dengan nilai 11,49%, disusul Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 10,98%, kemudian Provinsi Jawa Timur dengan nilai 10,49%, dan Provinsi Jawa Barat dengan nilai 7,98%, Provinsi Banten dengan nilai 6,24%, dan DKI Jakarta dengan nilai 4,61%. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Provinsi Jawa Barat, dengan kategori Provinsi yang memiliki kemiskinan tinggi dan diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun depan. Tentu saja penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan tajam angka kemiskinan akibat pemulihan negara dari epidemi yang juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas penurunan jumlah penduduk miskin titik pertumbuhan utama dalam pemilihan strategi atau instrumen pembangunan, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (pemerintah pusat dan daerah). Berikut data jumlah penduduk miskin di perkotaan Jawa Barat tahun 2018 – 2023. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2018 – 2023 (persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	7,14	6,66	7,69	8,13	7,73	7,27
Sukabumi	6,76	6,22	7,09	7,70	7,34	7,01
Cianjur	9,81	9,15	10,36	11,18	10,55	10,22
Bandung	6,65	5,94	6,91	7,15	6,80	6,4
Garut	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42	9,77
Tasikmalaya	9,85	9,12	10,34	11,15	10,73	10,28
Ciamis	7,22	6,65	7,62	7,97	7,72	7,42
Kuningan	12,22	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12
Cirebon	10,70	9,94	11,24	12,30	12,01	11,2
Majalengka	10,79	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21
Sumedang	9,76	9,05	10,26	10,71	10,14	9,36
Indramayu	11,89	11,11	12,70	13,04	12,77	12,13
Subang	8,67	8,12	9,31	10,03	9,75	9,52
Purwakarta	7,99	7,48	8,27	8,83	8,70	8,46
Karawang	8,06	7,39	8,26	8,95	8,44	7,87
Bekasi	4,37	4,01	4,82	5,21	5,01	4,93
Bandung Barat	10,06	9,38	10,49	11,30	10,82	10,52
Pangandaran	8,12	7,71	8,99	9,65	9,32	8,98
Kota Bogor	5,93	5,77	6,68	7,24	7,10	6,67
Kota Sukabumi	7,12	6,67	7,70	8,25	8,02	7,5
Kota Bandung	3,57	3,38	3,99	4,37	4,25	3,96
Kota Cirebon	8,88	8,41	9,52	10,03	9,82	9,16
Kota Bekasi	4,11	3,81	4,38	4,74	4,43	4,1
Kota Depok	2,14	2,07	2,45	2,58	2,53	2,38
Kota Cimahi	4,94	4,39	5,11	5,35	5,11	4,66
Kota Tasikmalaya	12,71	11,60	12,97	13,13	12,72	11,53
Kota Banjar	5,70	5,50	6,09	7,11	6,73	6,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Jawa barat tergolong tinggi, bahkan pada beberapa daerah seperti Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kota Tasikmalaya memiliki persentase penduduk miskin lebih dari 10%.

Sedangkan daerah dengan persentase penduduk miskin paling rendah yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung yang, memiliki persentase penduduk miskin di bawah 5%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat adalah dari kualitas sumber daya manusianya. Daerah dengan kualitas SDM yang tinggi akan memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar tenaga kerja. Dalam membentuk kualitas SDM yang tinggi yaitu salah satunya dengan melihat dari akses pendidikan. Pendidikan membekali masyarakat dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, namun efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai (Karolinska, Panjaitan, & Simamora, 2023). Jika peningkatan lama sekolah tidak diikuti dengan tersedianya kesempatan kerja yang relevan atau mutu pendidikan yang baik, maka pengurangan kemiskinan tidak akan optimal, bahkan bisa menimbulkan pengangguran terdidik. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting dalam menekan angka kemiskinan, tetapi harus diiringi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penciptaan peluang ekonomi yang memadai. Berikut ini data rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 (tahun)

Kabupaten/Kota	Rata-rata lama sekolah					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	7,88	8,29	8,3	8,31	8,34	8,37
Sukabumi	6,8	7,02	7,07	7,1	7,11	7,33
Cianjur	6,93	6,97	7,18	7,19	7,2	7,22
Bandung	8,58	8,79	8,96	9,07	9,08	9,1
Garut	7,5	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84
Tasikmalaya	7,13	7,17	7,35	7,48	7,73	7,96
Ciamis	7,6	7,69	7,7	7,9	8	8,09
Kuningan	7,36	7,38	7,57	7,8	7,88	7,89
Cirebon	6,62	6,71	6,92	7,1	7,4	7,64
Majalengka	6,91	7,09	7,27	7,31	7,49	7,52
Sumedang	8,17	8,27	8,51	8,52	8,72	8,73
Indramayu	5,98	5,99	6,3	6,52	6,83	6,94
Subang	6,84	6,85	7,1	7,11	7,2	7,45
Purwakarta	7,75	7,92	8,09	8,1	8,11	8,13
Karawang	7,35	7,65	7,77	7,78	7,96	8,04

Kabupaten/Kota	Rata-rata lama sekolah					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bekasi	8,84	8,84	9,12	9,3	9,53	9,57
Bandung Barat	7,97	8,18	8,19	8,2	8,22	8,23
Pangandaran	7,58	7,67	7,74	7,85	8,03	8,04
Kota Bogor	10,3	10,32	10,33	10,53	10,63	10,64
Kota Sukabumi	9,53	9,58	9,59	9,81	10,14	10,37
Kota Bandung	10,63	10,74	10,75	10,99	11	11,06
Kota Cirebon	9,89	9,9	9,91	10,12	10,33	10,37
Kota Bekasi	11,09	11,1	11,16	11,31	11,44	11,66
Kota Depok	10,85	11	11,28	11,46	11,47	11,58
Kota Cimahi	10,94	10,95	10,96	11,08	11,21	11,39
Kota Tasikmalaya	9,04	9,13	9,33	9,52	9,53	9,54
Kota Banjar	8,6	8,62	8,63	8,77	8,78	8,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023

Menurut Human Development Report (HDR) yang pertama pada tahun 1999, pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan pilihan manusia. Pilihan yang paling penting adalah pilihan pribadi, seperti panjang umur dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan, dan memperoleh sumber daya untuk menjalani kehidupan layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian dengan menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup (panjang umur dan sehat, pengetahuan dan hidup layak) (BPS, 2023). Ketiganya memiliki pengertian yang luas karena terkait banyak faktor. Banyak cara dalam melakukan pengukuran, contoh dalam dimensi kesehatan, angka harapan hidup waktu lahir digunakan sebagai indikatornya. Dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya dimensi hidup layak, menggunakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak sebagai indikator.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab jumlah penduduk miskin yaitu ditentukan dengan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja tidak bertambah. Pengangguran yaitu pertambahan tenaga kerja yang tidak dapat diimbangi oleh pertambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru.

Pengangguran mencakup pengangguran terbuka (open unemployment), yaitu kondisi di mana tenaga kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Selain itu, di wilayah perkotaan juga terdapat masalah pengangguran terselubung (underemployment), yaitu situasi di mana seseorang bekerja tetapi jam kerjanya lebih sedikit dari standar normal. Jenis pengangguran terbuka ini umumnya banyak dijumpai di kota-kota yang sedang mengalami perkembangan. Berikut disajikan data Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2018 hingga 2023. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 (persen)

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	9.83	9.11	14.29	12.22	10.64	7,44
Sukabumi	7.84	8.05	9.60	9.51	7.77	8,47
Cianjur	10.23	9.81	11.05	9.32	8.41	7,32
Bandung	5.07	5.51	8.58	8.32	6.98	7,71
Garut	7.12	7.35	8.95	8.68	7.60	6,52
Tasikmalaya	6.92	6.31	7.12	6.16	4.17	7,33
Ciamis	4.64	5.16	5.66	5.06	3.75	3,89
Kuningan	9.10	9.68	11.22	11.68	9.81	3,52
Cirebon	10.64	10.35	11.52	10.38	8.11	9,49
Majalengka	5.00	4.37	5.84	5.71	4.16	7,65
Sumedang	7.54	7.70	9.89	9.18	7.72	4,12
Indramayu	8.46	8.35	9.21	8.30	6.49	6,94
Subang	8.71	8.68	9.48	9.77	7.77	6,46
Purwakarta	9.94	9.73	11.07	10.70	8.75	7,65
Karawang	9.12	9.68	11.52	11.83	9.87	7,72
Bekasi	9.74	9.00	11.54	10.09	10.31	8,95
Bandung Barat	8.55	8.24	12.25	11.65	9.63	8,87
Pangandaran	3.59	4.52	5.08	3.25	1.56	8,11
Kota Bogor	9.74	9.16	12.68	11.79	10.78	1,52
Kota Sukabumi	8.57	8.49	12.17	10.78	8.83	9,39
Kota Bandung	8.05	8.18	11.19	11.46	9.55	8,53
Kota Cirebon	9.07	9.04	10.97	10.53	8.42	8,83
Kota Bekasi	9.14	8.30	10.68	10.88	8.81	7,66
Kota Depok	6.66	6.12	9.87	9.76	7.82	7,9
Kota Cimahi	8.00	8.09	13.30	13.07	10.77	6,97
Kota Tasikmalaya	6.89	6.78	7.99	7.66	6.62	10,52
Kota Banjar	5.95	6.16	6.73	6.09	5.53	6,55
Provinsi Jawa Barat	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31	5,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa kenaikan signifikan pengangguran pada tahun 2020, ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mana terjadi pada Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Kenaikan tadi berangsur turun pada tahun berikutnya. Tingkat pengangguran yang terus meningkat secara umum disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Masalah ini akan menyebabkan masalah-masalah lain muncul, seperti naiknya tingkat kriminalitas, menurunnya daya beli masyarakat serta tentunya akan membuat kestabilan politik menjadi terganggu.

Upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Persoalan pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia, sehingga belum ditemukannya tanda akan berakhir permasalahan kemiskinan. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, dimana kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak dapat menikmati kebutuhan dasarnya.

Menurut Wiguna (2013), tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang. Tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata memiliki hubungan yang saling berkaitan. Artinya kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai macam indikator.

Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada pemberdayaan sektor-sektor ekonomi rakyat, salah satunya melalui Usaha Mikro dan Kecil (UMK). UMK berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal. Menurut Tambunan (2009) sektor UMK mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, sehingga menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi pengangguran dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kehadiran UMK yang kuat dan berdaya saing diyakini dapat mendorong mobilitas sosial ke arah yang lebih baik serta mempersempit kesenjangan ekonomi.

Berikut ini data Jumlah tenaga kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 5 Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 (orang)

Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	30008	52640	111053	124943	130541	84589
Sukabumi	30428	52971	89822	100473	103821	85014
Cianjur	25766	37442	73214	91773	78045	111340
Bandung	29752	43498	125926	102181	118593	205390
Garut	38703	54701	104839	127223	156408	89786
Tasikmalaya	37175	53708	107657	90281	118478	91495
Ciamis	25759	27736	60145	43149	57624	67617
Kuningan	8932	9415	19713	43557	28230	44148
Cirebon	34378	21315	60935	49490	67066	67028
Majalengka	37613	28405	86101	51245	92540	50683
Sumedang	13136	16147	46463	39916	56086	54347
Indramayu	20450	15758	37820	43489	49056	31636
Subang	18122	24864	40049	36426	39886	31563
Purwakarta	6163	12390	24316	29708	28871	26378
Karawang	7505	15146	34091	34311	33501	53214
Bekasi	10523	18796	43283	66311	43259	53553
Bandung Barat	15516	12119	24626	47933	37430	75317
Pangandaran	36183	27468	53113	23277	53487	44367
Kota Bogor	15275	6748	17772	15322	10528	30860
Kota Sukabumi	4548	5146	10459	11354	10411	7569
Kota Bandung	16823	19294	49957	65393	56020	118495
Kota Cirebon	3569	5318	9138	10544	9726	8872
Kota Bekasi	11577	9325	15764	21248	25247	40538
Kota Depok	19892	14516	34767	27763	27158	31238
Kota Cimahi	8673	6613	18348	15180	16035	23553
Kota Tasikmalaya	25680	33101	63784	70611	59579	40563
Kota Banjar	4058	5017	11975	8387	9938	9862

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020, seperti Kabupaten Bandung yang mulanya sebanyak 43498 orang di tahun 2019 menjadi 125926 orang di tahun 2020 dan menjadi 205390 orang pada tahun 2023. Pada daerah perkotaan juga mengalami hal yang sama seperti Kota Depok di tahun 2019 memiliki 14516 orang menjadi 34767 di tahun 2020. Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor UMK tersebut

menandakan masyarakat yang semakin inovatif dalam mengembangkan usahanya dan harapannya dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, supaya masyarakat memiliki pendapatan dan terbebas dari rantai garis kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2018-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dapat diambil perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023?
4. Bagaimana pengaruh usaha mikro dan kecil terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pembahasan dalam latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh usaha mikro dan kecil terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan dapat dimanfaatkan oleh:

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur yang berguna dalam pengembangan kajian Ilmu Ekonomi Pembangunan.

2. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu kemiskinan di masa depan.

3. Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi informasi yang relevan dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian serupa di kemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai panduan umum dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika penulisan tersebut terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai bagian pendahuluan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas teori-teori yang relevan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Selain itu, juga disajikan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan penguatan argumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pendekatan penelitian yang digunakan, meliputi teknik pengumpulan data, jenis data, definisi operasional variabel, serta metode analisis yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan, disertai dengan analisis dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab lima berisi ringkasan dan output yang disarikan dan inti dari bagian pembahasan yang dilakukan dari bagian-bagian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan informasi serta landasan yang mendukung arah dan fokus penelitian. Tinjauan terhadap studi terdahulu yang relevan disajikan dalam bentuk paparan berikut:

Miftaah Nur Faritz (2020), berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data panel dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, menggunakan Cross Section 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Time Series tahun 2009-2018, menggunakan model random effect. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di provinsi jawa tengah, rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di provinsi jawa tengah.

Aulia Nur Azizah (2022), berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan data pada tahun 2017-2021 dengan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tulus T.H.Tambunan (2012), yang berjudul “Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah”. Metode penelitian yang digunakan adalah

analisa data sekunder dengan memakai data kemiskinan dan UMK di industri manufaktur pada tingkat provinsi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UMK memiliki peranan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan di tingkat provinsi. Namun, dampak tersebut bervariasi antar provinsi, tergantung pada perbedaan akses UMK terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, dukungan teknis, bahan baku, dan modal.

Dita Sekar Ayu (2018), berjudul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur melalui berbagai publikasi seperti *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka* dan *Data serta Informasi Kemiskinan Jawa Timur* untuk periode tahun 2010–2015. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effects, karena berdasarkan hasil uji F dan uji Hausman, model ini dinilai lebih sesuai dibandingkan model lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya, variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi tersebut.

Ari Kristin Prasetyoningrum, U. Sulia Sukmawati (2018), berjudul “pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara langsung terhadap tingkat kemiskinan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berupa data panel, yaitu gabungan antara data *time series* untuk periode 2013–2017 dan data *cross section* dari 33 provinsi di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan metode analisis jalur (path analysis) menggunakan perangkat lunak *WarpPLS 5.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh langsung dan negatif terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,71. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,23. Sebaliknya,

variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien jalur sebesar 0,14 dan signifikan pada tingkat probabilitas 0,0035. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengangguran berperan sebagai variabel mediasi antara IPM dan tingkat kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga berperan dalam memediasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani, Nenik Woyanti (2018), berjudul “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 hingga 2015”. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan jenis data *cross-section* yang mencakup 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, serta data *time-series* dari tahun 2011 hingga 2015. Model analisis yang digunakan untuk estimasi regresi data panel adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, atau dikenal juga sebagai *Least Square Dummy Variable*. Hasil analisis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adapun variabel Tingkat Pengangguran Terbuka juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan optimalisasi layanan kesehatan.

Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed (2021), berjudul “Pengaruh dari Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menggunakan data sekunder per semester selama periode 2009 hingga 2019, yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya, variabel tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia terbukti memiliki

pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara simultan, ketiga variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Menurut Nimietz (2011) dalam Maipita (2014), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran. Selain itu, Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau wilayah tidak mampu mencapai kehidupan yang layak atau tidak dapat meningkatkan standar hidup ke tingkat yang lebih baik.

1. Indikator Kemiskinan

Menurut BPS (2016), tolok ukur dari kemiskinan terdiri dari:

- a. *Head Count Index*, atau indeks kedalaman kemiskinan, yang mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, mencerminkan seberapa jauh kondisi ekonomi mereka dari batas minimum kebutuhan.
- b. *Poverty Gap Index* (indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. *Poverty Severity Index* (indeks keparahan kemiskinan), atau indeks keparahan kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara masyarakat miskin itu sendiri.

2. Penyebab Kemiskinan

Beberapa ahli memiliki pandangan berbeda terkait faktor-faktor yang menimbulkan kemiskinan, salah satunya disampaikan oleh Maipita (2014: 60):

1. Menurut pendapat Spicker, terdapat empat madzhab atau aliran pemikiran yang menjelaskan penyebab kemiskinan, yaitu:
 - a. *Individual explanation*: Aliran ini meyakini bahwa kemiskinan muncul karena sifat atau karakter individu yang miskin itu sendiri. Sifat-sifat tersebut contohnya malas, kurang tekun dalam berbagai hal termasuk pekerjaan, serta sering membuat keputusan yang keliru, seperti salah memilih sekolah, pekerjaan, tempat tinggal, dan jalan hidup.
 - b. *Familiar explanation*: Menurut pandangan ini, kemiskinan lebih sering dipengaruhi oleh faktor keturunan. Misalnya, orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan yang kurang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak mampu memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Akibatnya, anak-anak tersebut kemudian terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama.
 - c. *Subcultural explanation*: Aliran ini berpendapat bahwa kemiskinan bersumber dari budaya, kebiasaan, adat, atau pola perilaku yang berkembang di lingkungan sekitar. Contohnya, di beberapa masyarakat, hanya perempuan yang bekerja, atau ada kebiasaan untuk menerima kondisi hidup apa adanya tanpa usaha keras, atau kepercayaan untuk mengabdikan pada bangsawan tanpa mengharapkan upah. Pola hidup seperti ini membuat masyarakatnya tetap miskin, meskipun mereka tidak selalu merasa miskin karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.
 - d. *Structural explanation*: Dalam pandangan ini, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan status yang lahir dari adat, kebijakan, atau aturan tertentu. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam akses pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan lain, sehingga kelompok dengan status sosial rendah atau hak terbatas menjadi rentan jatuh dalam kemiskinan.
2. Isdjoyo membedakan faktor-faktor penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pertama, untuk daerah pedesaan, kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya:

- a. Ketidakmampuan untuk berdaya, yang timbul akibat terbatasnya lapangan pekerjaan, harga jual hasil produksi yang rendah, serta biaya pendidikan yang tinggi.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan, sulitnya akses transportasi, dan tidak tersedianya fasilitas kredit membuat masyarakat desa terpinggirkan dan akhirnya terjebak dalam kemiskinan.
- c. Kekurangan materi, yang disebabkan oleh modal usaha yang terbatas dan sempitnya lahan pertanian, sehingga pendapatan yang diperoleh pun relatif kecil.
- d. Tingginya kerentanan, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan tetap, dominasi pekerjaan musiman, serta risiko bencana alam, membuat masyarakat desa semakin rentan jatuh miskin.
- e. Sikap pasrah dan kurangnya dorongan untuk bekerja lebih giat juga menjadi faktor yang memperkuat kondisi kemiskinan di pedesaan.

Kedua, pada dasarnya kemiskinan di perkotaan dipicu oleh faktor-faktor yang serupa dengan kemiskinan di pedesaan. Namun, perbedaannya terletak pada akar penyebab masing-masing faktor tersebut. Sebagai contoh, ketidakberdayaan di wilayah perkotaan umumnya disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja serta tingginya biaya hidup.

3. Sharp dan rekan-rekannya (1996), sebagaimana dikutip oleh Kuncoro (2006), mencoba menjelaskan penyebab kemiskinan dari sudut pandang ekonomi. Pertama, pada tingkat mikro, kemiskinan timbul karena ketidakmerataan pola kepemilikan sumber daya yang kemudian menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan dalam hal akses terhadap permodalan turut berkontribusi pada munculnya kemiskinan.

Ketiga faktor penyebab kemiskinan tersebut pada akhirnya bermuara pada konsep lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan

oleh Nurkse (dalam Kuncoro, 2006). Menurut teori ini, keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, serta keterbatasan modal menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi rendah. Pendapatan yang rendah berdampak pada minimnya tabungan dan investasi. Rendahnya tingkat investasi kemudian memperkuat kondisi keterbelakangan, sehingga siklus kemiskinan terus berulang.

2.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Danim (2004), terdapat tiga alasan utama mengapa investasi di bidang pendidikan perlu dilakukan. Pertama, pendidikan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan, khususnya di sektor pertanian, serta turut mendorong penyerapan tenaga kerja ke sektor industri modern. Kedua, investasi pendidikan berperan penting dalam menekan kesenjangan pendapatan antarindividu atau kelompok. Ketiga, pendidikan dapat menjadi sarana strategis untuk mereformasi struktur distribusi pendapatan agar lebih merata. Penjelasan yang diberikan di atas mengindikasikan bahwa terdapat keterkaitan erat antara pendidikan dengan fenomena ketidaksetaraan pendapatan, yang pada akhirnya bermuara pada persoalan kemiskinan. Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali menjadi akar dari siklus kemiskinan yang berulang, di mana individu yang tidak memperoleh pendidikan layak cenderung memiliki peluang kerja yang terbatas dan penghasilan yang rendah. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi strategi kunci dalam upaya jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

2.2.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan harga tetap pada tahun dasar tertentu. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga (inflasi atau deflasi), sehingga angka PDRB benar-benar mencerminkan perubahan volume produksi barang dan jasa, bukan sekadar perubahan nilai karena fluktuasi harga pasar. Dengan demikian,

PDRB atas harga konstan menjadi indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah dari tahun ke tahun (BPS, 2023). Menurut (Mankiw, Makroekonomi, 2003), PDRB atas harga konstan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang sejauh mana perekonomian daerah benar-benar mengalami ekspansi atau kontraksi, tanpa bias inflasi. Mankiw juga menjelaskan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB konstan penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan pembangunan regional. Oleh karena itu, dalam berbagai analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan, data PDRB atas harga konstan sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi secara lebih objektif.

Ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, hal ini memicu kebutuhan input produksi yang lebih besar, terutama tenaga kerja. Peningkatan peluang kerja dari pertumbuhan PDRB ini telah terbukti menjadi mediator penting pengurangan kemiskinan. Sodik Purnomo & Istiqomah (2019) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan jika pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja yang memadai. Artinya, peningkatan PDRB membuka akses pekerjaan yang luas, sehingga penduduk terutama mereka dari lapisan ekonomi bawah mendapat pendapatan yang membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. Studi Sirilius Seran dkk. (2017) juga menunjukkan bahwa pendidikan dan kesempatan kerja berperan langsung dalam menurunkan kemiskinan melalui jalur pertumbuhan ekonomi; tanpa penyerapan tenaga kerja yang cukup, efek penurunan kemiskinan dari pertumbuhan menjadi kurang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra & Ginting (2024) di Kota Bukittinggi, yang mendapati bahwa variabel PDRB dan struktur tenaga kerja (ketersediaan dan kualitas SDM) secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Artinya, ketika produksi meningkat dan diikuti dengan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas (hasil dari pendidikan), maka pendapatan pekerja naik dan tingkat kemiskinan turun. Komponen pendidikan di sini menjadi sangat penting, karena kualitas tenaga kerja (lulusan sekolah atau pelatihan) akan menentukan seberapa efektif penyerapan tenaga kerja dan kemampuan untuk menghasilkan output yang lebih produktif.

Dalam mengukur perkembangan keberhasilan PDRB setiap periode dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan menggambarkan seberapa besar perubahan nilai produksi barang dan jasa secara riil di suatu daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Karena menggunakan harga tetap, laju pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan atau penurunan produksi nyata tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga. Menurut penelitian oleh Romhadhoni dan Dita Zamrotul Faizah (2018) laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan merupakan indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi regional secara objektif dan konsisten. Laju pertumbuhan yang positif mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi, sedangkan pertumbuhan yang negatif menandakan kontraksi atau penurunan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah sering menggunakan data ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan dan merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase jumlah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari kerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. TPT memberikan gambaran mengenai kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja perekonomian.

TPT dihitung dengan rumus berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah Pengangguran adalah jumlah individu usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari kerja.

Jumlah Angkatan Kerja mencakup penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari kerja (pengangguran).

TPT penting untuk memahami efektivitas kebijakan ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk usia kerja. Tingkat

pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan kerja di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlambatan ekonomi, kurangnya investasi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, atau kendala struktural lainnya. Oleh karena itu, data TPT digunakan oleh pemerintah untuk merancang kebijakan seperti pelatihan vokasi, insentif investasi, atau program penciptaan lapangan kerja demi mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

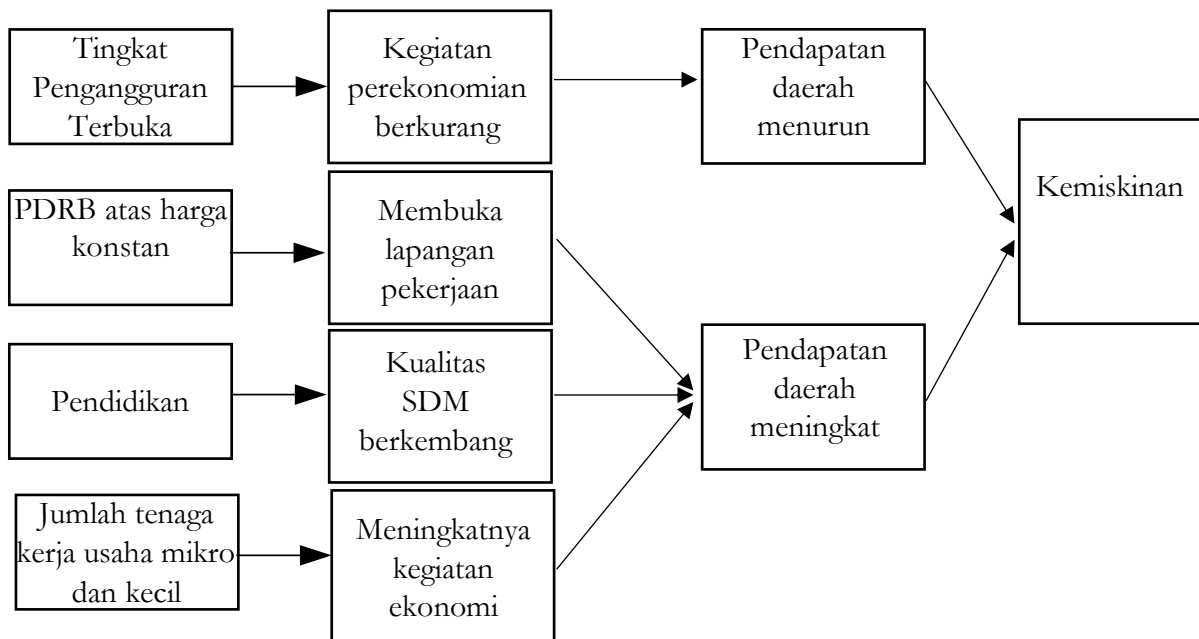
2.2.5 Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), perusahaan atau usaha industri merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di lokasi tertentu dengan bangunan yang disediakan untuk memproduksi barang atau jasa. Usaha ini juga memiliki catatan administratif terkait produksi dan pembiayaan, yang melibatkan satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha tersebut. Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2008, berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis usaha tersebut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, serta memenuhi kriteria usaha kecil yang tercantum dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini.

Peningkatan jumlah UMK akan mendorong munculnya industri-industri baru, yang akan menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan pasar. Peran penting UMK dalam perekonomian terletak pada kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja, yang diiringi dengan meningkatnya jumlah unit usaha yang mendukung pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat dapat digunakan untuk konsumsi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli ini akan berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hubungan antar Variabel Independen dan Dependen

2.4.1 Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Pendidikan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan karena membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang seseorang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya pendidikan membatasi keterampilan dan

peluang ekonomi. Tilak (2007) dalam *Education and Poverty*, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan

2.4.2 Hubungan PDRB atas Harga Konstan Terhadap Kemiskinan

Menurut Kuznets, terdapat keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini adalah pertumbuhan PDRB) dan tingkat kemiskinan. Pada awal proses pembangunan, kemiskinan cenderung meningkat, namun menjelang akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin akan menurun. Oleh karena itu, secara tidak langsung, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, kemiskinan akan berkurang.

Ketika PDRB meningkat, dibutuhkan lebih banyak input produksi, salah satunya tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi ini mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Akibatnya, jumlah penduduk miskin berkurang karena lebih banyak orang memperoleh penghasilan. Namun, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan agar bisa terserap optimal dalam sektor-sektor produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seiring permintaan tenaga kerja yang meningkat sehingga kemiskinan juga akan menurun.

2.4.3 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Setiap daerah tentu menginginkan pembangunan ekonomi yang optimal. Untuk mencapainya, salah satu tantangan utama yang harus diatasi adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari atau tidak memiliki pekerjaan akibat keterbatasan lapangan kerja. Lapangan kerja mencakup berbagai sektor, seperti industri manufaktur dan perkantoran, yang idealnya dapat menyerap seluruh tenaga kerja jika ketersediaan pekerjaan seimbang dengan jumlah pencari kerja (Tambunan T.T., (2012). Tingginya tingkat pengangguran terbuka menjadi faktor pemicu meningkatnya angka kemiskinan,

karena individu yang tidak memiliki pekerjaan tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, semakin tingginya tingkat pengangguran maka dapat memperburuk kemiskinan di Jawa Barat.

2.4.4 Hubungan Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Kemiskinan

Menurut Tambunan (2012), pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Dampak pengurangan kemiskinan melalui UMK sangat bergantung pada seberapa kuat hubungan bisnis antara UMK dan sektor ekonomi lokal di daerah tersebut. Semakin erat keterkaitan produksi dan bisnis antar pelaku usaha di dalam daerah, maka akan semakin kecil potensi terjadinya 'kebocoran ekonomi lokal', sehingga efek pengganda dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi lebih besar. Kebocoran ekonomi lokal sendiri terjadi, misalnya, ketika UMK membeli bahan baku dari luar daerah atau memproduksi barang antara yang kemudian digunakan oleh industri di luar wilayah tersebut. Kondisi ini tidak hanya mengurangi nilai tambah ekonomi lokal, tetapi juga menghilangkan peluang penciptaan lapangan kerja yang seharusnya bisa terwujud apabila rantai produksi tetap berada dalam daerah. Dengan demikian, semakin banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor UMK dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian adalah suatu pernyataan atau dugaan awal yang diajukan sebelum adanya jawaban yang valid. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018-2023.
2. Diduga PDRB atas harga konstan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018- 2023.
3. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018- 2023.

4. Diduga UMK berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2018- 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian dan Sumber Data

Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan data panel (*pooled data*), yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data tersebut dapat diakses melalui website yang disediakan oleh lembaga pengelola data.

1. Data kemiskinan tahun 2018-2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
2. Data rata-rata lama sekolah tahun 2018-2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
3. Laju pertumbuhan PDRB 2018-2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
4. Data tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2018-2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
5. Data jumlah tenaga kerja Usaha Kecil Mikro (UMK) tahun 2018-2023 bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi lembaga yang berwenang dalam pengelolaan data statistik, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu:

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendidikan

Meggunakan data rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur lamanya masa pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Data yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat dengan satuan tahun.

2. Laju pertumbuhan PDRB (X2)

Laju pertumbuhan PDRB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, seperti provinsi atau kabupaten/kota, dalam periode waktu tertentu. Data yang digunakan diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat dengan satuan persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (X3)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk yang masuk dalam usia kerja namun belum bekerja atau sedang menunggu pekerjaan jika ada permintaan kerja. Data diambil dari BPS Provinsi Jawa Barat dengan satuan persen.

4. Jumlah tenaga kerja usaha mikro dan kecil (UMK) (X4)

Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah total individu yang bekerja di unit usaha dengan skala kecil dan mikro, yang biasanya memiliki modal terbatas, tenaga kerja sedikit, serta berfokus pada kegiatan ekonomi lokal atau sektor informal. Data diambil dari BPS Provinsi Jawa Barat dengan satuan persen.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum untuk mencapai standar hidup yang layak di suatu negara. Data diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2023 dengan satuan persen.

3.3 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan data *time series* dan *cross section* untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hubungan antar variabel dalam dimensi waktu dan antar unit pengamatan. Dalam data panel, setiap variabel memiliki dua subskrip, yaitu *i* yang mewakili unit individu (seperti provinsi atau kabupaten/kota), dan *t* yang menunjukkan dimensi waktu atau periode pengamatan. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 12. Dalam regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Pemilihan pendekatan terbaik dilakukan berdasarkan hasil uji yang sesuai, seperti *uji Chow*, *uji Hausman*, dan *uji Lagrange Multiplier (LM)*, sehingga model yang digunakan dapat memberikan hasil estimasi yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik data yang dianalisis. Berikut merupakan bentuk model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan (%)

X_1 = rata-rata lama sekolah (tahun)

X_2 = laju pertumbuhan ekonomi (%)

X_3 = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

X_4 = Jumlah tenaga usaha kecil mikro (orang)

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Secara umum, penggunaan data panel akan menghasilkan koefisien intersep dan slope yang bervariasi di setiap Kabupaten/Kota dan selama periode waktu yang berbeda. Karena itu, dalam proses estimasi persamaan di atas, hasilnya sangat tergantung pada asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope, dan variabel gangguannya. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu:

1. Dalam asumsi ini, intersep dan slope diasumsikan tetap konstan sepanjang waktu dan di seluruh individu (provinsi), sedangkan perbedaan dalam nilai intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan.
2. Asumsi ini mengatakan bahwa slope tetap konstan, namun nilai intersep berbeda antara individu (provinsi).
3. Dalam asumsi ini, slope dianggap tetap konsisten, namun nilai intersepnnya berbeda baik antara berbagai periode waktu maupun antara individu.
4. Asumsi ini menyatakan bahwa baik intersep maupun slope berbeda antara individu.
5. Dalam asumsi ini, intersep dan slope diasumsikan berbeda antara periode waktu yang berbeda dan juga antara individu yang berbeda.

Namun demikian ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

3.3.1.1 Metode Common Effect

Salah satu pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan menggabungkan data dari *time series* dan *cross section* tanpa mempertimbangkan variasi antar waktu dan individu. Dengan menggabungkan data ini tanpa memperhatikan perbedaan di antara mereka, kita dapat menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Squares*) untuk melakukan estimasi model data panel. Pendekatan ini sering disebut sebagai metode *Estimasi Common Effect* (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

i = *cross section*

$t = \text{time series}$

3.3.1.2 Metode Fixed Effect

Model yang memperhitungkan adanya variasi intersep dalam persamaan yang disebutkan dikenal sebagai model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah cara untuk mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep. Konsep *Fixed Effect* ini berdasarkan ide bahwa terdapat perbedaan intersep antara entitas, dalam hal ini perusahaan, namun intersep tersebut konsisten sepanjang waktu (*time invariant*). Selain itu, dalam model ini diasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap konstan di antara berbagai entitas di seluruh periode waktu (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 D_{2i} \dots + e_{it}$$

Keterangan:

D = *Dummy*

3.3.1.3 Metode Random Effect

Model Random Effect merupakan salah satu metode estimasi data panel yang dirancang untuk menangani kemungkinan adanya keterkaitan atau korelasi antara variabel gangguan di berbagai periode waktu dan antar individu. Dalam pendekatan ini, perbedaan antar individu (seperti perusahaan, wilayah, atau unit lainnya) tidak diakomodasi melalui intersep yang tetap seperti pada Fixed Effect, melainkan melalui komponen error yang bersifat individual dan acak. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa variasi antar individu ditangkap oleh komponen error yang berbeda-beda, namun tetap sepanjang waktu. Salah satu keunggulan dari metode Random Effect adalah kemampuannya dalam mengatasi permasalahan heteroskedastisitas serta efisiensi dalam estimasi parameter bila asumsi dasarnya terpenuhi. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM) atau sering kali

diestimasi menggunakan teknik *Generalized Least Square* (GLS) (Widarjono, 2018). Secara matematis, model ini dapat dituliskan sebagai:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + v_{it} \dots \dots (2) v_{it} = e_{it} + u_i$$

Persamaan tersebut merupakan persamaan untuk metode *random effect*. Nama metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan v_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh e_{it} . Dalam hal ini variabel gangguan u_i adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu.

3.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat 3 pengujian dalam menentukan model terbaik yaitu diantaranya *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect*. 3 uji tersebut adalah *uji Chow*, *uji LM*, dan *uji Hausmann*.

3.4.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik di antara *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Hipotesis dalam uji Chow adalah:

$H_0 = \text{Common Effect}$ merupakan model terbaik

$H_a = \text{Fixed Effect}$ merupakan model terbaik

Jika hasil uji spesifikasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-square* melebihi tingkat signifikansi (α), maka pilihan model yang lebih tepat adalah *common effect*. Sebaliknya, jika probabilitas *Chi-square* berada di bawah tingkat signifikansi (α), maka disarankan untuk menggunakan model *fixed effect*. Namun, jika model *fixed effect* yang dipilih, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *uji Hausman* untuk menentukan apakah model yang sebaiknya digunakan adalah *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

3.4.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan metode yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Random Effect*. Uji LM ini dikembangkan oleh Breusch

Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *model random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Hipotesis dalam uji LM adalah:

$$H_0 = \text{Common Effect merupakan model terbaik}$$

$$H_a = \text{Random Effect merupakan model terbaik}$$

Uji LM didasarkan pada distribusi Chi-squares dengan *degree of freedom* yang sama dengan jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistic lebih besar dari nilai kritis statistik Chi-squares maka menolak hipotesis nol. Ini berarti bahwa perkiraan yang benar untuk model regresi data panel adalah *Random Effect* daripada metode OLS atau metode *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai kritis statistik Chi-square, maka hipotesis nol tidak ditolak. Ini berarti perkiraan yang benar adalah *Common Effect*.

3.4.3 Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk memilih model yang paling sesuai antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dalam pengujian ini, hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa *model Random Effect* lebih tepat digunakan, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa *model Fixed Effect* lebih sesuai. Apabila nilai probabilitas dari *Cross-section random* lebih besar dari tingkat signifikansi (α), maka *model Random Effect* dianggap paling cocok. Sebaliknya, jika nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari α , maka *model Fixed Effect* sebaiknya dipilih.

3.5 Uji Signifikansi

3.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas dari F statistik lebih kecil daripada tingkat signifikansi (α), maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F statistik melebihi tingkat signifikansi (α), maka semua variabel independen dianggap tidak memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji-t adalah prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan hipotesis nol. Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat penjas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas setiap variabel independen. Ketika nilai prob tiap variabel independen $<$ taraf signifikansi (α) maka hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, apabila nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas variabel independen melebihi tingkat signifikansi (α), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana garis regresi mampu menjelaskan variasi dalam data (*goodness of fit*). Artinya, ini menunjukkan seberapa baik model regresi merepresentasikan data yang diamati. Jika seluruh titik data tepat berada di garis regresi yang berarti semua nilai residu sama dengan nol maka model regresi tersebut dianggap sempurna. Namun, kondisi ideal seperti ini sangat jarang terjadi dalam praktik. Umumnya, nilai residu (e_i) bisa bernilai positif atau negatif, yang menandakan bahwa garis regresi tidak sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, tujuan dari model regresi adalah meminimalkan nilai residu tersebut. Nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) digunakan untuk menilai kualitas model, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik model dalam menjelaskan variasi data, dan sebaliknya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini mengkaji tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan model data panel. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder berupa data *cross-section* dan *time series* dari setiap provinsi di Jawa Barat selama periode 2018 hingga 2023. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendidikan, Laju pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah pekerja UMK. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, serta pekerja UMK terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2023. Pendekatan analisis yang diterapkan menggunakan metode data panel dengan bantuan software Eviews 12.

4.2 Statistika Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Statistika Deskriptif

	KEMISKINAN	C	PENDIDIKAN	PDRB	TPT	UMK
Mean	8.262284	1.000000	8.598951	3.974136	8.357840	43388.90
Median	8.265000	1.000000	8.175000	5.015000	8.510000	34201.00
Maximum	13.13000	1.000000	11.66000	9.760000	14.29000	205390.0
Minimum	2.070000	1.000000	5.980000	-3.800000	1.520000	3569.000
Std. Dev	2.750715	0.000000	1.452416	2.674980	2.324245	35246.68
Skewness	-0.237395	NA	0.558175	-1.253916	-0.355323	1.466306
Kurtosis	2.304807	NA	2.168441	3.695383	3.147004	5.507720
Jarque-Bera	4.783855	NA	13.07967	45.71627	3.554735	100.4999
Probability	0.091453	NA	0.001445	0.000000	0.169083	0.000000
Sum	1338.490	162.0000	1393.030	643.8100	1353.970	7029001.

Sum SQ. Dev	1218.196	0.000000	339.6313	1152.039	869.7403	2.00E+11
Observations	162	162	162	162	162	162

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berada pada angka 8,262284. Nilai terendah tingkat kemiskinan tercatat sebesar 2,070000, sedangkan nilai tertingginya adalah 13,13000. Standar deviasi sebesar 2,750715, yang nilainya lebih kecil dibandingkan rata-ratanya, mengindikasikan bahwa variasi atau penyebaran data cukup merata di sekitar nilai rata-rata.

Variabel pendidikan berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa nilai maksimum lama sekolah mencapai 11,66000 tahun, dengan rata-rata lama pendidikan di Provinsi Jawa Barat sebesar 8,598951 tahun. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 1,452416 tahun yang lebih kecil dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa penyebaran data tergolong merata di sekitar nilai tengahnya.

Variabel laju PDRB atas harga konstan dari data tersebut mengindikasikan bahwa nilai maksimum sebesar 9.760000 persen dan nilai rata-rata laju PDRB atas harga konstan di provinsi Jawa Barat sebesar 3.974136. Nilai standar deviasi variabel laju PDRB atas harga konstan sebesar 2.674980 lebih rendah dari pada nilai rata rata sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyebaran data yang merata.

Variabel tingkat pengangguran terbuka dari data tersebut mengindikasikan bahwa nilai maksimum tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat sebesar 14.29000 persen dan nilai rata-rata sebesar 8.357840 persen. Nilai standar deviasi variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 2.324245 persen lebih tinggi daripada nilai rata rata sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyebaran data yang tidak merata.

Variabel pekerja UMK dari data tersebut mengindikasikan bahwa nilai maksimum pekerja UMK di Provinsi Jawa Barat sebesar 205390.0 orang dan nilai rata-rata sebesar 43388.90 orang. Nilai standar deviasi pekerja UMK sebesar 35246.68

orang lebih rendah daripada nilai rata rata sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyebaran data yang merata.

4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Pemilihan Model Regresi

4.3.1.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model mana yang paling baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Adapun hipotesis yang digunakan dalam *uji Chow* adalah sebagai berikut:

H0= Model *Common Effect* yang paling baik

Ha= Model *Fixed Effect* yang paling baik

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	108.063378	(26,131)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	504.012434	26	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Prob. Cross-section chi-square sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa p-value < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model dengan estimasi fixed effect lebih baik dibandingkan dengan model common effect. Oleh karena itu, model fixed effect dianggap sebagai model yang paling baik. Selanjutnya, untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang lebih sesuai, dilakukan pengujian lebih lanjut dengan uji Hausman Test untuk membandingkan kedua model tersebut.

4.3.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara *random effect* dan *fixed effect* dengan menguji perbedaan signifikan antara estimasi kedua model. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Model *Random Effect* yang paling baik

H_a : Model *Fixed Effect* yang paling baik

Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	49.013543	4	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa $p\text{-value} < 0,05$. Hal ini menyebabkan H₀ ditolak dan H_a diterima, sehingga disimpulkan bahwa estimasi *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *random effect*. Dengan demikian, model yang paling baik untuk digunakan adalah model *fixed effect*.

Kesimpulannya, dalam perbandingan antara model *common-effect*, *fixed effect*, dan *random-effect*, model yang paling baik untuk interpretasi data panel dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*.

4.3.2 Estimasi Model Fixed Effect

Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob,
C	-1.539632	1.929163	-0.798083	0.4263
PENDIDIKAN	1.012217	0.214612	4.716498	0.0000
PDRB	-0.022201	0.020617	-1.076809	0.2835
TPT	0.115352	0.044683	2.581570	0.0109
UMK	5.12E-06	2.09E-06	2.449496	0.0156
R-squared	0.976523			

Adjust R-square	0.971147
F-statistic	181.6343
Prob F-statistic	0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12

Model regresi berganda fixed effect pada tingkat ketimpangan pendapatan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Pendidikan}_{it} + \beta_2 \text{PDRB}_{it} + \beta_3 \text{TPT}_{it} + \beta_4 \text{UMK}_{it} + \mu_{it}$$

Di mana:

Y adalah Tingkat Kemiskinan

β_0 adalah Koefisien Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ adalah Koefisien Variabel Independen

X1 adalah rata-rata lama sekolah (tahun)

X2 adalah laju PDRB atas harga konstan (persen)

X3 adalah tingkat pengangguran terbuka (persen)

X4 adalah jumlah tenaga kerja UMK (orang)

I adalah Cross Section (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)

t adalah Time Series (Tahun 2018-2023)

Ut adalah Variabel Pengganggu

Dari tabel regresi model Fixed effect yang telah disajikan, terlihat bahwa tingkat kemiskinan sebesar -1,539632 dengan asumsi tidak ada variabel independen lainnya (pendidikan, PDRB atas harga konstan, TPT, dan pekerja UMK).

4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran dari variabel independen untuk menjelaskan variansi variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan variabel pendidikan, PDRB atas harga konstan, TPT, dan pekerja UMK terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,971147 atau 97,1147

persen. Hal ini menunjukkan bahwa varian variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan, PDRB atas harga konstan, TPT, dan pekerja UMK sebesar 97,1147 persen, sedangkan sisanya sebesar 2,8853 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai statistik F sebesar 181,6343 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan, PDRB atas dasar harga konstan, TPT, dan jumlah pekerja UMK secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4.3.5 Uji Parameter Individual (Uji t)

4.3.5.1 Variabel Pendidikan

Dari hasil estimasi model Fixed Effect, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel pendidikan sebesar 1,012217 dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Sehingga ini menandakan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa barat. Dengan demikian jika pendidikan naik 1 tahun maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,012217 persen.

4.3.5.2 Variabel PDRB Atas Harga Konstan

Berdasarkan hasil estimasi dengan model Fixed Effect, diperoleh bahwa koefisien variabel PDRB atas dasar harga konstan sebesar -0,022201 dengan nilai probabilitas 0,2835 yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB atas harga konstan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat.

4.3.5.3 Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *model Fixed Effect*, diperoleh bahwa koefisien variabel TPT adalah sebesar 0,115352 dengan nilai probabilitas 0,0109 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain, setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen diperkirakan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,115352 persen di wilayah tersebut.

4.3.5.4 Variabel pekerja Usaha Mikro Kecil (UMK)

Dari hasil estimasi model Fixed Effect, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien variabel pekerja UMK sebesar 5.12E-06 dan nilai probabilitas sebesar $0,0156 < 0,05$. Sehingga ini menandakan bahwa variabel pekerja UMK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa barat. Dengan demikian jika pekerja UMK naik 1 orang maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,00000512 persen

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa pendidikan yang dalam hal ini rata-rata lama sekolah memiliki arah pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Mankiw (2012), yang menjelaskan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan seseorang akan meningkatkan pendapatan atau upah yang diterimanya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kenaikan rata-rata lama sekolah dengan peningkatan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, dan keterampilan kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga tidak secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan karena lulusan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak (Febrianty dkk, 2024).

Hubungan positif antara rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan mencerminkan kondisi di mana peningkatan rata-rata lama sekolah belum diikuti oleh

penurunan kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena rata-rata lama sekolah di banyak daerah masih tergolong rendah dan belum cukup untuk meningkatkan peluang kerja yang signifikan. Selain itu, daerah miskin cenderung menjadi sasaran program pendidikan, sehingga lama sekolah meningkat tetapi kemiskinan tetap tinggi. Akibatnya, terlihat pola di mana keduanya naik bersamaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandey, Engka, dan Siwu (2023), yang menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah berkontribusi positif terhadap peningkatan angka kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Jawa Barat, yang berkisar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (7–9 tahun) dalam hal ini baru lulusan SMP, yang artinya mereka bekerja dengan perolehan gaji yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga menyumbang kemiskinan. Penelitian Surbakti, Sihombing, dan Muchtar (2023) turut memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat memiliki daya saing dan keterampilan yang rendah dalam memasuki dunia kerja. Akibatnya, produktivitas menurun, pendapatan terbatas, dan kemiskinan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada lamanya masa pendidikan, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terbaru.

4.4.2 Pengaruh PDRB atas harga konstan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis, variabel PDRB atas dasar harga konstan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. PDRB atas harga konstan memang mengukur pertumbuhan output riil suatu daerah tanpa terpengaruh inflasi, tetapi angka ini tidak secara otomatis mencerminkan distribusi pendapatan atau kualitas hidup masyarakat.

Salah satu faktor yang menyebabkan fenomena ini yaitu pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat cenderung tidak merata. Sebagian besar pertumbuhan PDRB ditopang oleh sektor-sektor padat modal seperti industri pengolahan dan jasa keuangan, yang tidak

banyak menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin atau berpendidikan rendah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan tersebut hanya dirasakan oleh sebagian kecil penduduk.

Menurut Todaro & Smith (2012), pertumbuhan ekonomi tanpa disertai pemerataan pendapatan dapat memperparah ketimpangan sosial. Dengan demikian, PDRB yang meningkat tanpa upaya untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak kepada kelompok miskin, tidak cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (growth-oriented) tetapi juga memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (pro-poor growth).

4.4.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, serta memiliki arah pengaruh positif atau searah. Hal tersebut menandakan naiknya pengangguran akan diikuti oleh tingkat kemiskinan dan sebaliknya.

Tingginya TPT menunjukkan bahwa banyak individu dalam usia kerja yang belum terserap dalam pasar kerja, yang berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan. Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka adalah wilayah perkotaan di Jawa Barat seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor mengalami urbanisasi yang sangat cepat, sehingga banyak pendatang baru yang mencari pekerjaan namun tidak semuanya terserap ke dalam pasar kerja formal. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak mendorong peningkatan pengangguran dan memperbesar potensi kemiskinan.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh Nabibah dan Hanifa (2022), yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran memiliki dampak negatif berupa penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya

menurunkan tingkat kesejahteraan. Selain itu, tingginya angka pengangguran juga dapat memengaruhi prospek pembangunan ekonomi jangka panjang serta menyebabkan menurunnya pendapatan nasional.

Dalam mengatasi masalah pengangguran supaya meminimalisir efek domino kedalam kemiskinan adalah diperlukan upaya yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas pekerjaan dan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Program pelatihan vokasional, peningkatan akses pendidikan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan TPT dan, secara bersamaan, mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

4.4.4 Pengaruh pekerja UMK terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi, variabel jumlah tenaga kerja pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMK justru berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis awal bahwa UMK berperan besar dalam mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.

Banyak tenaga kerja yang diserap di sektor UMK bekerja dalam kondisi yang kurang layak, seperti upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, dan terbatasnya akses terhadap peningkatan keterampilan. UMK seringkali beroperasi dalam sektor informal yang tidak mampu memberikan pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, meskipun UMK menyerap tenaga kerja, kualitas pekerjaan yang ditawarkan belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja tersebut, sehingga tidak efektif dalam menekan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Tri Handayani (2021) yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja Usaha Kecil Mikro tidak bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Sektor informal, termasuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), kerap menjadi tempat berlabuh bagi tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal, meskipun tingkat produktivitas dan pendapatannya sangat rendah (Todaro & Smith, 2012). Karena itu, pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor UMK

tanpa disertai peningkatan kualitas usaha, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja justru berisiko memperparah tingkat kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

1. Pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan belum secara efektif menurunkan kemiskinan, diakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya kesempatan kerja yang sesuai bagi para lulusan.
2. PDRB atas dasar harga konstan terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Barat, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat terutama golongan masyarakat yang hidup di garis kemiskinan.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja layak mendorong peningkatan pengangguran dan memperbesar potensi kemiskinan.
4. Jumlah pekerja di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang mencerminkan bahwa peningkatan tenaga kerja UMK tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan karena rendahnya kualitas pekerjaan di sektor diakibatkan rendahnya pendapatan upah di sektor UMK.

5.2 Implikasi

1. Pemerintah perlu fokus tidak hanya pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar meminimalisir adanya *miss match of skill* yang berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
2. Pemerintah perlu lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah supaya semua masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, dan penguatan sektor ekonomi lokal.

3. Pemerintah perlu mengembangkan program penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas sektor-sektor ekonomi yang padat karya untuk menurunkan angka pengangguran dan sekaligus mengurangi kemiskinan.
4. Penguatan sektor UMK perlu dikembangkan pada peningkatan kualitas usaha dan produktivitas, pemberian akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta jaminan sosial tenaga kerja, agar UMK benar-benar dapat menjadi motor penggerak dalam mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 hingga 2015. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 113-123.
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *dspace uiu*, 1-24.
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023*.
- Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1): 15–21.
- Febrianty, A. D., Safara, M. A., Purniawan, N. S., Maulida, V., & Farliana, N. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Proporsi Ketenagakerjaan Tahun 2024. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(3): 1996-2002.
- Handayani, I. T., Prasetyanto, P. K., & Hutajulu, D. M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(4), 820-833.
- Karolinska, B., Panjaitan, I., & Simamora, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 11 (2): 213-225.
- Kuncoro, m. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori Maslah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mandey, D. R., Engka, D. S., & Siwu, H. F. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-rata Lama Sekolah, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 4(1):82-88.
- Mankiw, N. G. (2003). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 2(3), 1-13.
- Pemerintah Pusat. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Indonesia.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217-240.
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129-136.
- Romhadhoni, P., & Dita Zamrotul Faizah, N. A. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, 14(2), 115–121.
- Surbakti, S. P., Sihombing, P. R., & Muchtar, M. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37-45.
- T.H.Tambunan, T. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 73 - 92.
- Tambunan, T. T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tilak, J. (2007). *Post-elementary education, poverty and development in India*. 27, 435-445: International Journal of Educational Development.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (7th Ed.)*. Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. London: Pearson Education.

- Tyas, K. P. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2009-2013. *UJY Library*, 1-13.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiguna, V. I. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 1-32.

LAMPIRAN

lampiran 1 Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Pendidikan	PDRB	TPT	UMK
Bogor	2018	7,14	7,88	6,19	9,83	30008
Bogor	2019	6,66	8,29	5,85	9,11	52640
Bogor	2020	7,69	8,3	-1,76	14,29	111053
Bogor	2021	8,13	8,31	3,55	12,22	124943
Bogor	2022	7,73	8,34	5,25	10,64	130541
Bogor	2023	7,27	8,37	5,19	8,47	84589
Sukabumi	2018	6,76	6,8	5,79	7,84	30428
Sukabumi	2019	6,22	7,02	5,64	8,05	52971
Sukabumi	2020	7,09	7,07	-0,91	9,6	89822
Sukabumi	2021	7,7	7,1	3,74	9,51	100473
Sukabumi	2022	7,34	7,11	5,12	7,77	103821
Sukabumi	2023	7,01	7,33	5,17	7,32	85014
Cianjur	2018	9,81	6,93	6,23	10,23	25766
Cianjur	2019	9,15	6,97	5,67	9,81	37442
Cianjur	2020	10,36	7,18	-0,77	11,05	73214
Cianjur	2021	11,18	7,19	3,48	9,32	91773
Cianjur	2022	10,55	7,2	5,04	8,41	78045
Cianjur	2023	10,22	7,22	5,16	7,71	111340
Bandung	2018	6,65	8,58	6,26	5,07	29752
Bandung	2019	5,94	8,79	6,36	5,51	43498
Bandung	2020	6,91	8,96	-1,8	8,58	125926
Bandung	2021	7,15	9,07	3,56	8,32	102181
Bandung	2022	6,8	9,08	5,35	6,98	118593
Bandung	2023	6,4	9,1	4,97	6,52	205390
Garut	2018	9,27	7,5	4,96	7,12	38703
Garut	2019	8,98	7,51	5,02	7,35	54701
Garut	2020	9,98	7,52	-1,26	8,96	104839
Garut	2021	10,65	7,53	3,58	8,68	127223
Garut	2022	10,42	7,83	5,08	7,6	156408
Garut	2023	9,77	7,84	4,94	7,33	89786
Tasikmalaya	2018	9,85	7,13	5,7	6,92	37175
Tasikmalaya	2019	9,12	7,17	5,43	6,31	53708
Tasikmalaya	2020	10,34	7,35	-0,98	7,12	107657
Tasikmalaya	2021	11,15	7,48	3,43	6,16	90281
Tasikmalaya	2022	10,73	7,73	4,7	4,17	118478

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Pendidikan	PDRB	TPT	UMK
Tasikmalaya	2023	10,28	7,96	4,69	3,89	91495
Ciamis	2018	7,22	7,6	5,44	4,64	25759
Ciamis	2019	6,65	7,69	5,38	5,16	27736
Ciamis	2020	7,62	7,7	-0,14	5,66	60145
Ciamis	2021	7,97	7,9	3,66	5,06	43149
Ciamis	2022	7,72	8	5,02	3,75	57624
Ciamis	2023	7,42	8,09	4,99	3,52	67617
Kuningan	2018	12,22	7,36	6,43	9,1	8932
Kuningan	2019	11,41	7,38	6,59	9,68	9415
Kuningan	2020	12,82	7,57	0,11	11,22	19713
Kuningan	2021	13,1	7,8	3,56	11,68	43557
Kuningan	2022	12,76	7,88	5,53	9,81	28230
Kuningan	2023	12,12	7,89	5,25	9,49	44148
Cirebon	2018	10,7	6,62	5,02	10,64	34378
Cirebon	2019	9,94	6,71	4,68	10,35	21315
Cirebon	2020	11,24	6,92	-1,08	11,52	60935
Cirebon	2021	12,3	7,1	2,47	10,38	49490
Cirebon	2022	12,01	7,4	4,09	8,11	67066
Cirebon	2023	11,2	7,64	4,85	7,65	67028
Majalengka	2018	10,79	6,91	6,08	5	37613
Majalengka	2019	10,06	7,09	7,77	4,37	28405
Majalengka	2020	11,43	7,27	0,89	5,84	86101
Majalengka	2021	12,33	7,31	4,75	5,71	51245
Majalengka	2022	11,94	7,49	6,63	4,16	92540
Majalengka	2023	11,21	7,52	6,15	4,12	50683
Sumedang	2018	9,76	8,17	5,83	7,54	13136
Sumedang	2019	9,05	8,27	6,33	7,7	16147
Sumedang	2020	10,26	8,51	-1,12	9,89	46463
Sumedang	2021	10,71	8,52	3,17	9,18	39916
Sumedang	2022	10,14	8,72	5,03	7,72	56086
Sumedang	2023	9,36	8,73	5,01	6,94	54347
Indramayu	2018	11,89	5,98	1,34	8,46	20450
Indramayu	2019	11,11	5,99	3,2	8,35	15758
Indramayu	2020	12,7	6,3	-1,58	9,21	37820
Indramayu	2021	13,04	6,52	0,58	8,3	43489
Indramayu	2022	12,77	6,83	2,88	6,49	49056
Indramayu	2023	12,13	6,94	9,76	6,46	31636
Subang	2018	8,67	6,84	4,43	8,71	18122

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Pendidikan	PDRB	TPT	UMK
Subang	2019	8,12	6,85	4,61	8,68	24864
Subang	2020	9,31	7,1	-1,15	9,48	40049
Subang	2021	10,03	7,11	2,18	9,77	36426
Subang	2022	9,75	7,2	4,29	7,77	39886
Subang	2023	9,52	7,45	4,64	7,65	31563
Purwakarta	2018	7,99	7,75	4,98	9,94	6163
Purwakarta	2019	7,48	7,92	4,37	9,73	12390
Purwakarta	2020	8,27	8,09	-2,13	11,07	24316
Purwakarta	2021	8,83	8,1	3,42	10,7	29708
Purwakarta	2022	8,7	8,11	5,24	8,75	28871
Purwakarta	2023	8,46	8,13	4,97	7,72	26378
Karawang	2018	8,06	7,35	6,46	9,12	7505
Karawang	2019	7,39	7,65	4,21	9,68	15146
Karawang	2020	8,26	7,77	-3,8	11,52	34091
Karawang	2021	8,95	7,78	5,85	11,83	34311
Karawang	2022	8,44	7,96	6,31	9,87	33501
Karawang	2023	7,87	8,04	5,4	8,95	53214
Bekasi	2018	4,37	8,84	6,02	9,74	10523
Bekasi	2019	4,01	8,84	3,95	9	18796
Bekasi	2020	4,82	9,12	-3,39	11,54	43283
Bekasi	2021	5,21	9,3	3,62	10,09	66311
Bekasi	2022	5,01	9,53	5,3	10,31	43259
Bekasi	2023	4,93	9,57	5,32	8,87	53553
Bandung Barat	2018	10,06	7,97	5,5	8,55	15516
Bandung Barat	2019	9,38	8,18	5,05	8,24	12119
Bandung Barat	2020	10,49	8,19	-2,41	12,25	24626
Bandung Barat	2021	11,3	8,2	3,46	11,65	47933
Bandung Barat	2022	10,82	8,22	5,34	9,63	37430
Bandung Barat	2023	10,52	8,23	5	8,11	75317
Pangandaran	2018	8,12	7,58	5,41	3,59	36183
Pangandaran	2019	7,71	7,67	5,94	4,52	27468
Pangandaran	2020	8,99	7,74	-0,05	5,08	53113
Pangandaran	2021	9,65	7,85	3,67	3,25	23277
Pangandaran	2022	9,32	8,03	5,03	1,56	53487
Pangandaran	2023	8,98	8,04	5,26	1,52	44367
Kota Bogor	2018	5,93	10,3	6,14	9,74	15275
Kota Bogor	2019	5,77	10,32	6,19	9,16	6748
Kota Bogor	2020	6,68	10,33	-0,41	12,68	17772

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Pendidikan	PDRB	TPT	UMK
Kota Bogor	2021	7,24	10,53	3,76	11,79	15322
Kota Bogor	2022	7,1	10,63	5,65	10,78	10528
Kota Bogor	2023	6,67	10,64	5,1	9,39	30860
Kota Sukabumi	2018	7,12	9,53	5,52	8,57	4548
Kota Sukabumi	2019	6,67	9,58	5,53	8,49	5146
Kota Sukabumi	2020	7,7	9,59	-1,49	12,17	10459
Kota Sukabumi	2021	8,25	9,81	3,71	10,78	11354
Kota Sukabumi	2022	8,02	10,14	5,35	8,83	10411
Kota Sukabumi	2023	7,5	10,37	5,12	8,53	7569
Kota Bandung	2018	3,57	10,63	7,08	8,05	16823
Kota Bandung	2019	3,38	10,74	6,79	8,18	19294
Kota Bandung	2020	3,99	10,75	-2,28	11,19	49957
Kota Bandung	2021	4,37	10,99	3,76	11,46	65393
Kota Bandung	2022	4,25	11	5,41	9,55	56020
Kota Bandung	2023	3,96	11,06	5,07	8,83	118495
Kota Cirebon	2018	8,88	9,89	6,2	9,07	3569
Kota Cirebon	2019	8,41	9,9	6,29	9,04	5318
Kota Cirebon	2020	9,52	9,91	-0,98	10,97	9138
Kota Cirebon	2021	10,03	10,12	3,05	10,53	10544
Kota Cirebon	2022	9,82	10,33	5,1	8,42	9726
Kota Cirebon	2023	9,16	10,37	5,01	7,66	8872
Kota Bekasi	2018	4,11	11,09	5,86	9,14	11577
Kota Bekasi	2019	3,81	11,1	5,41	8,3	9325
Kota Bekasi	2020	4,38	11,16	-2,58	10,68	15764
Kota Bekasi	2021	4,74	11,31	3,22	10,88	21248
Kota Bekasi	2022	4,43	11,44	4,96	8,81	25247
Kota Bekasi	2023	4,1	11,66	5,43	7,9	40538
Kota Depok	2018	2,14	10,85	6,97	6,66	19892
Kota Depok	2019	2,07	11	6,74	6,12	14516
Kota Depok	2020	2,45	11,28	-1,92	9,87	34767
Kota Depok	2021	2,58	11,46	3,76	9,76	27763
Kota Depok	2022	2,53	11,47	5,24	7,82	27158
Kota Depok	2023	2,38	11,58	5,05	6,97	31238
Kota Cimahi	2018	4,94	10,94	5,68	8	8673
Kota Cimahi	2019	4,39	10,95	7,85	8,09	6613
Kota Cimahi	2020	5,11	10,96	-2,26	13,3	18348
Kota Cimahi	2021	5,35	11,08	4,19	13,07	15180
Kota Cimahi	2022	5,11	11,21	5,92	10,77	16035

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Pendidikan	PDRB	TPT	UMK
Kota Cimahi	2023	4,66	11,39	5,19	10,52	23553
Kota Tasikmalaya	2018	12,71	9,04	5,93	6,89	25680
Kota Tasikmalaya	2019	11,6	9,13	5,97	6,78	33101
Kota Tasikmalaya	2020	12,97	9,33	-2,01	7,99	63784
Kota Tasikmalaya	2021	13,13	9,52	3,57	7,66	70611
Kota Tasikmalaya	2022	12,72	9,53	5,01	6,62	59579
Kota Tasikmalaya	2023	11,53	9,54	5,96	6,55	40563
Kota Banjar	2018	5,7	8,6	5,07	5,95	4058
Kota Banjar	2019	5,5	8,62	5,03	6,16	5017
Kota Banjar	2020	6,09	8,63	0,94	6,73	11975
Kota Banjar	2021	7,11	8,77	3,49	6,09	8387
Kota Banjar	2022	6,73	8,78	4,29	5,53	9938
Kota Banjar	2023	6,14	8,79	4,71	5,43	9862

lampiran 2 Common Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 06/16/25 Time: 14:46
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.26108	1.225034	15.72289	0.0000
PENDIDIKAN	-1.305271	0.116966	-11.15939	0.0000
PDRB	-0.033074	0.066915	-0.494269	0.6218
TPT	0.039434	0.078344	0.503335	0.6154
UMK	6.23E-07	4.77E-06	0.130489	0.8963
Root MSE	1.990693	R-squared		0.473005
Mean dependent var	8.262284	Adjusted R-squared		0.459578
S.D. dependent var	2.750715	S.E. of regression		2.022144
Akaike info criterion	4.276571	Sum squared resid		641.9833
Schwarz criterion	4.371868	Log likelihood		-341.4023
Hannan-Quinn criter.	4.315263	F-statistic		35.22886
Durbin-Watson stat	0.108213	Prob(F-statistic)		0.000000

lampiran 3 Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 06/16/25 Time: 14:46
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.539632	1.929163	-0.798083	0.4263
PENDIDIKAN	1.012217	0.214612	4.716498	0.0000
PDRB	-0.022201	0.020617	-1.076809	0.2835
TPT	0.115352	0.044683	2.581570	0.0109
UMK	5.12E-06	2.09E-06	2.449496	0.0156

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.420164	R-squared	0.976523
Mean dependent var	8.262284	Adjusted R-squared	0.971147
S.D. dependent var	2.750715	S.E. of regression	0.467240
Akaike info criterion	1.486371	Sum squared resid	28.59908
Schwarz criterion	2.077208	Log likelihood	-89.39607
Hannan-Quinn criter.	1.726260	F-statistic	181.6343
Durbin-Watson stat	1.857058	Prob(F-statistic)	0.000000

lampiran 4 Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/16/25 Time: 14:47
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.677525	1.521228	4.389561	0.0000
PENDIDIKAN	0.088433	0.162949	0.542707	0.5881
PDRB	-0.026874	0.020394	-1.317724	0.1895
TPT	0.057405	0.042863	1.339252	0.1824
UMK	1.04E-05	1.90E-06	5.479007	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.974138	0.9470
Idiosyncratic random		0.467240	0.0530

Weighted Statistics			
Root MSE	0.521763	R-squared	0.245170
Mean dependent var	0.794638	Adjusted R-squared	0.225939
S.D. dependent var	0.602411	S.E. of regression	0.530006
Sum squared resid	44.10230	F-statistic	12.74846
Durbin-Watson stat	1.254589	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.041485	Mean dependent var	8.262284
Sum squared resid	1268.733	Durbin-Watson stat	0.043611

lampiran 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	108.063378	(26,131)	0.0000
Cross-section Chi-square	504.012434	26	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 06/16/25 Time: 14:47
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 27
Total panel (balanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.26108	1.225034	15.72289	0.0000
PENDIDIKAN	-1.305271	0.116966	-11.15939	0.0000
PDRB	-0.033074	0.066915	-0.494269	0.6218
TPT	0.039434	0.078344	0.503335	0.6154
UMK	6.23E-07	4.77E-06	0.130489	0.8963
Root MSE	1.990693	R-squared		0.473005
Mean dependent var	8.262284	Adjusted R-squared		0.459578
S.D. dependent var	2.750715	S.E. of regression		2.022144
Akaike info criterion	4.276571	Sum squared resid		641.9833
Schwarz criterion	4.371868	Log likelihood		-341.4023
Hannan-Quinn criter.	4.315263	F-statistic		35.22886
Durbin-Watson stat	0.108213	Prob(F-statistic)		0.000000

lampiran 6 Uji Hasuman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	49.013543	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PENDIDIKAN	1.012217	0.088433	0.019506	0.0000
PDRB	-0.022201	-0.026874	0.000009	0.1223
TPT	0.115352	0.057405	0.000159	0.0000
UMK	0.000005	0.000010	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 06/16/25 Time: 14:47

Sample: 2018 2023

Periods included: 6

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.539632	1.929163	-0.798083	0.4263
PENDIDIKAN	1.012217	0.214612	4.716498	0.0000
PDRB	-0.022201	0.020617	-1.076809	0.2835
TPT	0.115352	0.044683	2.581570	0.0109
UMK	5.12E-06	2.09E-06	2.449496	0.0156

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.420164	R-squared	0.976523
Mean dependent var	8.262284	Adjusted R-squared	0.971147
S.D. dependent var	2.750715	S.E. of regression	0.467240
Akaike info criterion	1.486371	Sum squared resid	28.59908
Schwarz criterion	2.077208	Log likelihood	-89.39607
Hannan-Quinn criter.	1.726260	F-statistic	181.6343
Durbin-Watson stat	1.857058	Prob(F-statistic)	0.000000

lampiran 7 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	295.0372 (0.0000)	10.53348 (0.0012)	305.5707 (0.0000)
Honda	17.17665 (0.0000)	3.245532 (0.0006)	14.44066 (0.0000)
King-Wu	17.17665 (0.0000)	3.245532 (0.0006)	9.870601 (0.0000)
Standardized Honda	18.34363 (0.0000)	4.894688 (0.0000)	12.90451 (0.0000)
Standardized King-Wu	18.34363 (0.0000)	4.894688 (0.0000)	9.176913 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	305.5707 (0.0000)

lampiran 8 Statistika Deskriptif

	KEMISKINAN	C	PENDIDIKAN	PDRB	TPT	UMK
Mean	8.262284	1.000000	8.598951	3.974136	8.357840	43388.90
Median	8.265000	1.000000	8.175000	5.015000	8.510000	34201.00
Maximum	13.13000	1.000000	11.66000	9.760000	14.29000	205390.0
Minimum	2.070000	1.000000	5.980000	-3.800000	1.520000	3569.000
Std. Dev.	2.750715	0.000000	1.452416	2.674980	2.324245	35246.68
Skewness	-0.237395	NA	0.558175	-1.253916	-0.355323	1.466306
Kurtosis	2.304807	NA	2.168441	3.695383	3.147004	5.507720
Jarque-Bera	4.783855	NA	13.07967	45.71627	3.554735	100.4999
Probability	0.091453	NA	0.001445	0.000000	0.169083	0.000000
Sum	1338.490	162.0000	1393.030	643.8100	1353.970	7029001.
Sum Sq. Dev.	1218.196	0.000000	339.6313	1152.039	869.7403	2.00E+11
Observations	162	162	162	162	162	162